

PROPAGANDA TERHADAP UMAT ISLAM DI ZAMAN JEPANG, 1942-1945

Tendi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon (tendi@syekhnurjati.com)

Abstract

The period of Japanese occupation was one of the important phases of Indonesia's independence. This paper aims to find out how propaganda directed to Muslims by the Japanese military government to support and perpetuate their power in the Archipelago. From this study it is known that in its efforts to maintain the power and power of Allied attacks, Japan approached elements of Indonesian society. One of the targets is the Muslims, who are considered Japan as the majority group that can be invited to cooperation. On that basis, Japan then propaganda specifically against Muslims by continuing to provide policies that benefit the Islamic society of Indonesia.

Keywords: *propaganda, Muslims, Japanese period, military government*

Abstrak

Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu fase penting bagi kemerdekaan Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana propaganda yang ditujukan kepada umat Islam oleh pemerintahan militer Jepang guna mendukung dan melanggengkan kekuasaan mereka di wilayah Kepulauan Nusantara. Dari studi ini diketahui bahwa dalam upayanya mempertahankan kekuasaan dan kekuatan dari serangan Sekutu, Jepang mendekati unsur-unsur masyarakat Indonesia. Salah satu yang menjadi sasaran itu adalah umat Islam, yang dianggap Jepang sebagai kelompok mayoritas yang bisa diajak kerjasama. Dengan dasar itu, kemudian Jepang melakukan propaganda secara khusus terhadap umat Islam dengan terus memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Islam Indonesia.

Kata Kunci: propaganda, umat Islam, masa Jepang, pemerintah militer

A. Pendahuluan

Kehancuran armada Angkatan Laut Pasifik milik Amerika di Pearl Harbour, Hawaii, pada 7 Desember 1941 oleh Jepang menjadi titik awal pecahnya Perang Dunia II di Asia.¹ Pergerakan agresif Jepang dalam perang tersebut menyulut kemarahan Amerika beserta negara-negara sekutunya. Sebagai salah satu sekutu Amerika, Belanda pun mengambil

tindakan tegas dengan menyatakan perang terhadap Jepang. Setelah melihat sinyal tidak bersahabat dari Belanda, Jepang pun tidak ragu untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasainya, termasuk di antaranya adalah Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda.

Upaya penaklukan tanah Hindia oleh Jepang, dimulai dari penyerangan terhadap wilayah-wilayah paling utara Nusantara. Pada 10 Januari 1942, Tarakan, salah satu

¹ Auwjong Peng Koen, *Perang Pasifik 1941-1945*, (Jakarta: Pintu besar, 1957, h. 3.

bagian dari Pulau Kalimantan, berhasil diduduki oleh para tentara Jepang. Pasukan Belanda yang dibantu oleh milisi-milisi (misalnya dari *Bataafsche Petroleum Maatschapij*) sempat melakukan perlawanan selama dua hari. Namun karena keadaan tidak seimbang, pusat komando militer tentara Belanda pun akhirnya bisa direbut tentara Jepang.² Dari Tarakan, serdadu-serdadu Negeri Matahari Terbit mulai menaklukan daerah-daerah lain di timur Indonesia.

Pada awal Maret 1942, Jepang berhasil mengarahkan pasukannya ke Jawa. Di pusat Nusantara itu, akhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda bertekuk lutut di hadapan Jepang. Tanggal 8 Maret 1942 menjadi waktu dimana secara resmi Panglima Tentara Militer dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Pendudukan Jepang.³ Akibat dari peristiwa itu, seluruh wilayah Hindia-Belanda jatuh ke dalam penguasaan Jepang.

Untuk memenangkan Perang Asia Raya yang dimulainya, Jepang menyadari bahwa mereka tidak dapat

bergerak sendirian. Oleh karena itu, mereka selalu mencoba untuk menarik simpati masyarakat daerah-daerah yang didudukinya. Hal itu juga terjadi di wilayah Hindia Belanda, dimana Jepang selalu berusaha menarik simpati rakyat agar mereka dapat diperbantukan dalam pelbagai kebijakan perang Jepang.

Usaha dari Jepang untuk menarik simpati masyarakat Hindia itu terwujud dalam banyak hal, seperti misalnya pemberian izin dalam pengibarisan bendera Merah Putih di samping Hinomaru yang menjadi kebanggaan orang Jepang, pemberian izin untuk pemakaian Bahasa Indonesia di samping larangan untuk Bahasa Belanda, pemberian izin untuk menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya.” Tak hanya kebijakan-kebijakan populis itu, Jepang juga membentuk berbagai gerakan dan organisasi yang seolah-olah memberi ruang kebebasan berekspresi dan pendidikan yang lebih baik bagi kaum bumiputera, seperti Gerakan 3A, dan POETERA (Poesat Tenaga Rakjat). Dalam catatan Legge, Pemerintah Pendudukan Jepang dinyatakan melakukan usaha yang serius dalam memobilisasi dukungan rakyat Indonesia secara positif untuk

² Iwan Santosa, *Tarakan: "Pearl Harbor" Indonesia, 1942-1945*, (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2004), h. 2.

³ Tuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, (Bogor: Rajawali Corporation, 2002), h. 16.

kepentingan mereka.⁴ Organisasi-organisasi yang dibentuk secara sengaja oleh Pemerintah Pendudukan Jepang itu selanjutnya menjadi corong propaganda Jepang terhadap rakyat. Dalih “saudara tua” dan “pemimpin Asia” merupakan beberapa wujud dari propaganda tersebut. Untuk menarik lebih banyak massa, tokoh-tokoh nasional yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat dipilih sebagai motor penggerak organisasi. Dalam POETERA, Ir. Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan K. H. Mas Mansyur dipilih Jepang untuk memimpin organisasi tersebut.⁵

Di samping organisasi pergerakan, Jepang juga membentuk perkumpulan-perkumpulan lain yang bersifat semi militer. *Seinendan* (barisan pemuda), *Keibodan* (barisan pembantu polisi), *Suishintai* (barisan pelopor), dan *Gakutotai* (barisan pelajar), merupakan sejumlah organisasi semi militer bentukan Jepang yang memberi banyak pelatihan dan pengetahuan kepada

masyarakat Indonesia mengenai wawasan dan dasar-dasar ilmu kemiliteran. Dalam perkembangan selanjutnya, hal itu menginspirasi terbentuknya organisasi militer PETA (Pembela Tanah Air). Gatot Mangkupraja menjadi inisiator organisasi ini dengan mengajukan pembentukan satuan tentara PETA. Dengan dukungan pers yang juga melakukan desakan terhadap pemerintah, maka akhirnya Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* (Maklumat) No. 44, tanggal 3 Oktober 1943, yang berkaitan dengan pembentukan pasukan sukarela untuk membela Jawa.⁶ Peraturan ini menjadi titik penting bagi tumbuhnya benih-benih tentara pejuang kemerdekaan Indonesia.

Strategi Jepang untuk mengambil hati banyak masyarakat di Nusantara, juga diwujudkan dalam bentuk pendekatan terhadap umat Islam. Pada masa itu, Jepang banyak memberi kelonggaran-kelonggaran tertentu kepada Islam beserta para penganutnya. Dalam hal ini, kaum muslim Indonesia memang memiliki kesan tersendiri di benak orang-orang Jepang sehingga Pemerintahan Pendudukan memberikan perhatian yang sangat dalam untuk pelbagai hal yang berkaitan dengan Islam.

⁴ John David Legge, *Indonesia*, (Sydney: Prentice-Hall of Australia, 1977), h. 138.

⁵ Soekarno memiliki anggapan bahwa organisasi POETERA adalah media yang dapat menjadi penghubung antara Indonesia dengan cita-citanya, yaitu pemerintahan yang mandiri atau kemerdekaan. Lihat, Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, Jilid II, (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 9.

⁶ Prabu S. Suwondo, dkk., *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 51-53.

Sebenarnya, sikap itu bisa dikatakan sebagai sebuah anomali mengingat sebelumnya umat Islam sangat dikekang dan tidak diberi perhatian yang cukup oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal itu dapat terjadi karena Islam dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat kolonial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana propaganda yang ditujukan kepada umat Islam oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang guna mendukung dan melanggengkan kekuasaan mereka di wilayah Kepulauan Nusantara.

B. Propaganda dan Pemerintahan Militer Jepang

Propaganda berasal dari suatu kata kerja dalam bahasa Latin *propagare* yang artinya mengembangkan atau memekarkan. Menurut Qadaruddin, propaganda adalah sebuah upaya yang bersifat sistematis karena dibentuk secara sengaja guna memanipulasi alam pikiran atau kognisi, sehingga memengaruhi persepsi dan perilaku sesuai dengan kehendak pelaku propaganda.⁷ Dengan demikian, propaganda adalah sebuah upaya berkaitan dengan pesan yang

memiliki tujuan untuk mengubah sikap, memengaruhi pandangan dan tingkah laku dari sekelompok orang atau masyarakat sejalan dengan ketentuan yang telah direncanakan.

Sepanjang abad ke-20 dan hingga menjelang abad ke-21, terminologi ‘propaganda’ masih dianggap sebagai kata yang memiliki konotasi negatif. Hal itu dapat terjadi karena pada perang besar dunia di setengah awal abad ke-20, Inggris, Amerika dan sekutu-sekutunya hanya mencirikan propaganda sebagai kegiatan pembentukan opini yang penuh kebohongan dan kepalsuan dan dilakukan oleh musuh-musuh mereka.⁸

Harold Laswell yang hidup di era perang itu dan melakukan analisa terhadap propaganda, menyatakan pendapatnya tentang bagaimana banyak orang melihat propaganda dalam waktu-waktu tersebut:

Orang-orang ini menyelidiki misteri propaganda dengan kekaguman dan kekecewaan itu yang dengannya para korban pertarungan baru itu meminta agar hal itu dijelaskan. Itu utopianisme yang kredibel, yang memberi makan kata-kata perkasa, yang mengeksploitasi harapan massa dalam perang, dan ditanamkan dalam

⁷ Muhammad Qadaruddin, *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 15.

⁸ Douglas Walton, “What is Propaganda, and What Exactly is Wrong with it?”, *Public Affairs Quarterly*, 11, 1997, 383-384.

alam pikiran cara untuk sikap sinisme dan kekecewaan.⁹

Dalam propaganda, terdapat dua hal penting yang mesti terkait satu sama lain, yaitu komunikator dan komunikannya. Propaganda memberi jarak antara komunikator dan komunikan karena ini adalah bentuk komunikasi dari satu pihak ke banyak orang (*one to many*). Pihak pertama yang berperan sebagai komunikator dapat diidentifikasi sebagai seorang ahli yang memiliki kemampuan mumpuni dalam hal kontrol sosial.¹⁰ Sebagai komunikator dalam propaganda ini, Pemerintah Pendudukan Jepang memang memiliki penguasaan akan hal itu, sehingga dengan mudahnya melancarkan upaya tersebut terhadap masyarakat yang didudukinya.

Jika ditelisik dari sisi pihak Jepang, propaganda dikenal sebagai *sendenkasudou* dalam bahasa mereka. Kata ini berasal dari dua

kata yang dihubungkan, yaitu kata *senden* yang artinya adalah publikasi, iklan, periklanan, atau propaganda, serta kata *katsudou* yang artinya adalah aktivitas atau kegiatan.¹¹ Dengan demikian, dari gabungan dua kata itu muncul kata *sendentatsudou* yang memiliki arti sebagai aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk mempublikasikan atau mengiklankan suatu hal tertentu yang dikehendaki komunikator.

Propaganda menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan pendudukan Jepang di era Perang Dunia 2 karena tindakan itu menjadi salah satu alat penting bagi mereka untuk melanggengkan kekuasaan mereka di tempat-tempat yang berhasil mereka duduki. Dalam rangka persiapan aksi peperangan mereka ke wilayah Asia Tenggara, Jepang telah meresmikan empat biro propaganda pada musim panas tahun 1940 di Tokyo. Biro-biro yang diresmikan Pangeran Konoye itu aktif menyebarkan propaganda melalui siaran radio, pers, dan penyebaran pamflet. Di samping itu, propaganda juga dilakukan melalui pembicaraan secara lisan dan memberikan undangan kepada bangsa-bangsa yang masih terjajah untuk datang bekerja atau menuntut

⁹ “*These people probe the mysteries of propaganda with that compound of admiration and chagrin with which the victims of a new gambling trick demand to have the thing explained. That credulous utopianism, which fed upon the mighty words which exploited the hopes of the mass in war, has in many minds given way to cynicism and disenchantment.*” Baca lebih lanjut, Harold D. Laswell, *Propaganda Technique in World War I* (Cambridge, MA: MIT Press, 1971), h. 2-3.

¹⁰ Muhajir Affandi, *Komunikasi Propaganda Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 10-11.

¹¹ The Electronic Dictionary Research and Development Group, *Zkanji*, (Monash: Monash University, 2012).

pendidikan di Jepang.¹² Dalam hal ini, orang-orang Hindia Timur sudah diberi perhatian sejak paruh awal tahun 1930-an dengan diundangnya sejumlah wartawan dan redaksi *Bintang Timur* ke Jepang. Di samping itu, Jepang juga telah mendirikan surat kabarnya sendiri di Jawa yang bernama *Java Nippo* sejak tahun 1932. Kemudian, terbit pula surat kabar berbau Jepang lain seperti *Nichiran Shogyo Shinbun* dan *Tohindo Nippo*.¹³

Ketika datang ke Nusantara, Jepang pun melakukan kegiatan propaganda dan menjadikannya sebagai salah satu corong untuk menarik kepercayaan masyarakat. Bukti terkuat mengenai hubungan antara propaganda dengan pemerintahan militer Jepang ini adalah pembentukan suatu departemen khusus yang memang memiliki tugas untuk pembuatan dan penyebaran propaganda, yakni *Sendenbu* (Departemen Propaganda). Badan itu dibentuk pada bulan Agustus 1942, sebagai suatu badan yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Militer *Gunseikanbu*. Departemen ini merupakan badan

yang khusus dan terpisah dari seksi propaganda lain, termasuk propaganda militer atau Seksi Penerangan Angkatan Darat ke-16 yang melakukan propaganda terhadap tentara Jepang, tawanan perang, dan warga negara musuh melalui siaran luar negeri. Tanggung jawab *Sendenbu* adalah propaganda dan informasi yang berkaitan dengan pemerintahan sipil. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan *Sendenbu* lebih ditujukan kepada penduduk sipil di Jawa, yang mencakup orang Indonesia, Indo-Eropa, minoritas Asia, dan Jepang.¹⁴

Terdapat dua prinsip utama yang mesti dapat dilakukan dalam departemen tersebut, yaitu: *minshin ha'aku* yang merupakan cara bagaimana untuk menarik hati rakyat dan *senbu kosaku* yang merupakan upaya untuk mengindoktrinasi dan menjinakkan orang-orang pribumi. Kedua prinsip tersebut dilaksanakan untuk memobilisasi seluruh rakyat di bekas wilayah Hindia Belanda saat itu guna mendukung kepentingan perang Jepang. Di samping itu, prinsip-prinsip tersebut juga diharapkan dapat merubah mentalitas rakyat secara keseluruhan. Propaganda yang dilakukan Jepang

¹² Eric Robertson, "The Japanese File: Pre-war Japanese Penetration in Southeast Asia", Volume 18, Singapore, Heinemann Asia, 1979, h. 86-87.

¹³ Soebagijo IN, *Sumanang Sebuah Biografi*. (Jakarta: Gunung Agung, 1980), h. 68 dan 164.

¹⁴ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 229-231.

itu memiliki tujuan untuk mengindoktrinasi bangsa ini agar dapat menjadi sahabat/mitra yang dapat dipercaya dalam Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dengan dasar keyakinan bahwa bangsa Indonesia harus diarahkan kepada etos berpikir dan kerja layaknya orang Jepang.¹⁵

Kegiatan propaganda Jepang yang telah dilancarkan sejak lama, telah menanamkan anggapan bahwa mereka adalah bangsa yang bisa membebaskan Hindia Timur dari penjajahan kolonial Belanda. Pada saat pertama kali melakukan pendudukan pun, Jepang tidak dianggap sebagai penjajah namun malah disambut bak pahlawan oleh rakyat yang mengelu-elukan mereka dengan kata-kata “selamat datang” dan “*banzai*.” Hal itu dapat terjadi karena propaganda Jepang telah berjalan dengan baik, di samping adanya kerinduan akan kebebasan dan kemerdekaan dari rakyat Hindia, dan juga kepercayaan mereka terhadap ramalan lokal tentang ratu adil yang dijanjikan.¹⁶

¹⁵ Aiko Kurasawa, "Propaganda Media On Java Under the Japanese 1942-1945." dalam *Indonesia* No. 44, October 1997, h. 59.

¹⁶ Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1979), h. 13.

C. Pendudukan Jepang di Indonesia

Asia Tenggara memiliki nilai dan ketertarikan tersendiri di mata orang-orang Jepang yang membuat mereka sangat menginginkan wilayah tersebut. Dalam hal ini, Moedjanto menjabarkan bahwa Jepang memiliki minat kepada Asia Tenggara karena adanya ajaran kesatuan keluarga manusia (*Hokkaichiu*) di dalam *Shintoisme* yang mereka yakini.¹⁷ Dengan ajaran tersebut, timbul rasa solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang secara geografis dan antropologis dekat dengannya. Sebagai bangsa besar yang telah maju, Jepang merasa memiliki kewajiban untuk mendekati negara-negara di sekitarnya yang masih terbelakang dan membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan akibat kolonialisme Eropa.

Terkait hal itu, Jenderal Araki, seorang perwira militer Jepang sebelum Perang Dunia II, pernah menulis, bahwa:

Kekaisaran Jepang, dalam pandangan dirinya sendiri dan pandangan (negara) pemimpin Asia Timur lainnya dan dengan kekuatan untuk demikian itu, yang dikenal sebagai Kodo atau Jalan Kekaisaran, untuk menyebar-luas dan menyelamatkan

¹⁷ G. Moedjanto, *Indonesia abad Ke-20: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, Volume 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 66.

negara-negara yang tertindas, (Jepang) tidak bisa berdiam diri saja dan (hanya) melihat (dengan) tidak aktif atau melakukan apapun.¹⁸

Meskipun terkesan heroik, hal itu tetap tidak dapat menyayangkan pelaksanaannya yang dipenuhi banyak keganjalan berupa praktik-praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh para tentara Jepang. Dengan begitu, dalih ajaran religi itu pun seolah menjadi legalisator atas apa yang mereka lakukan pada Perang Dunia II: menduduki wilayah bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun, alasan itu telah mereka layangkan dan berhasil meraih simpati dari banyak pihak, khususnya dari bangsa-bangsa yang masih berada dalam penjajahan bangsa asing seperti Indonesia. Perlu digaris bawahi pula bahwa terdapat kemungkinan jika ajaran *Hokkaichiu* dalam Shintoisme itu yang selanjutnya melatar-belakangi penggunaan semboyan “Saudara Tua” di wilayah Asia Tenggara saat pasukan Jepang melakukan ekspansi militer dan pendudukan.

¹⁸ “*The Japanese Empire, in its own and other eyes the leader of East Asia and with the power to be so, whose call is Kodo or the Imperial Way, to spread out and save oppressed countries, cannot stand aside any longer and look on inactive.*” Lihat lebih lanjut, Eric Robertson, “The Japanese File: Pre-war Japanese Penetration in Southeast Asia”, Volume 18, Singapore, Heinemann Asia, 1979, h. 83.

Di samping masalah ruhani dan kepercayaan, aspek-aspek yang bersifat ekonomis juga turut memengaruhi kehadiran Jepang ke wilayah Asia Tenggara. Kekayaan alam yang sangat melimpah di wilayah itu, dapat dijadikan sebagai bahan baku industri dan juga material segar bagi produksi dan pembangunan militer Jepang. Hindia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang karena daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perang seperti karet, timah, minyak, bauksit, dan manggan.¹⁹ Tidak mengherankan apabila dalam masa-masa awal kedatangannya, Jepang banyak mengkonsentrasikan serangan dan kekuatan mereka di titik-titik vital yang berhubungan dengan aspek ekonomi, seperti perkebunan besar, pabrik, sumber minyak atau bahan bakar mentah, dan lain-lain.

Melalui latar belakang tersebut, Jepang melaksanakan serangan militer ke sejumlah titik di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Salah satu negara jajahan yang diserang oleh tentara Jepang adalah Hindia Belanda, nama

¹⁹ M.A. Azis, *Japan's Colonialism and Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1955), h. 100.

Indonesia sebelum merdeka dan masih dijajah Belanda.

Penyerangan yang dilakukan ke wilayah Hindia Belanda dilancarkan dengan strategi dan sokongan yang mumpuni sehingga keberhasilannya dapat diraih dengan cepat dari tempat ke tempat. Dengan memulai dari Tarakan di Kalimantan, Jepang mulai mengirimkan pasukan-pasukannya ke seluruh pelosok negeri, termasuk ke pulau terpenting jajahan Belanda saat itu: Pulau Jawa.

Dalam upayanya merebut Jawa dari tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Jepang mengerahkan kekuatan yang tidak sedikit. Jika dibandingkan dengan kekuatan militer Hindia Belanda yang menjaga Pulau Jawa saat itu, maka kekuatan militer tentara Jepang jauh lebih besar. Dengan delapan divisi pasukan, Jepang melakukan penyerangan kedudukan tentara Hindia Belanda di Pulau Jawa yang hanya berjumlah empat divisi pasukan saja.²⁰

Dengan kondisi yang demikian itu, kedatangan Jepang ke wilayah perairan dan daratan Jawa saat itu tidak dapat dibendung sama sekali oleh pasukan Belanda. Serbuan tentara Jepang yang dididik secara

militer ketat, berhasil membuat tentara Belanda yang hanya dididik sebagai tentara polisi benar-benar tidak berdaya. Dalam pertempuran-pertempuran yang terjadi, tentara Jepang begitu mudah merebut kedudukan Belanda di kota-kota yang didatanginya.

Terkait hal ini, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menjabarkan secara jelas faktor-faktor yang menurutnya bisa membuat tentara Jepang menang dengan sangat mudah atas tentara kolonial Belanda, yang di antaranya adalah:

- (a) Jumlah tentara Jepang sebanyak delapan divisi yang menyerang Jawa dua kali kekuatan seluruh tentara Jawa yang hanya empat divisi;
- (b) Tentara Hindia Belanda terutama hanya dididik sebagai polisi; dan
- (c) Rakyat Indonesia tidak ingin membantu Hindia Belanda karena mereka selalu ditindih.²¹

Setelah melalui rentetan pertempuran yang didominasi oleh kemenangan tentara Jepang, pemerintah kolonial Belanda pun

²⁰ Quispel, H.V., *Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog*, (London, 1945), h. 215.

²¹ Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1977), h. 75.

mulai kehilangan kepercayaan diri dan akhirnya memilih untuk menyerah. Takluknya Hindia Belanda secara resmi diumumkan oleh Panglima Tentara Hindia Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten, dan Gubernur Jenderal, yaitu Jhr Alidius Tjarda van Starckenbor Stachhouwer, pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati melalui siaran radio. Dengan demikian, sejak hari minggu itu, telah ada masa kekuasaan yang baru, yaitu masa Pendudukan Jepang.²²

Situasi perang yang demikian itu, tidak memungkinkan Jepang untuk melaksanakan pemerintahan yang 'normal' sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk mengelola bekas wilayah Hindia Belanda itu dengan sistem pemerintahan militer. Alasan keterbatasan sumber daya manusia yang ada saat itu dapat diminimalisir dengan strategi optimalisasi unsur-unsur militer yang ada.

Susunan dan tata negara yang ada di wilayah Nusantara pada saat itu, diatur oleh dua kelompok militer Jepang, yaitu Angkatan Darat (*Rikugun*) yang memiliki kuasa di wilayah Nusantara bagian barat dan

Angkatan Laut (*Kaigun*) yang memiliki kuasa atas wilayah bagian timur Nusantara. Dengan tujuan untuk semakin mempermudah koordinasi dan perintah, pemerintahan militer di Nusantara tersebut dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu:

- 1) Bagian barat yang dipimpin oleh Pasukan Tentara Jepang ke-25 yang kekuasaannya meliputi Sumatra dan Malaya, dengan berpusat di Bukittinggi;
- 2) Bagian tengah yang dikepalai oleh Pasukan Tentara Jepang ke-16 yang wilayahnya mencakup Pulau Jawa dan Madura, dengan pusat kekuasaan yang ada di Jakarta; dan
- 3) Bagian timur yang kepemimpinannya dipegang oleh Armada Selatan ke-2 Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*) dengan wilayah yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian. Adapun pusat kekuasaan ini terletak di Makassar.²³

Langkah awal yang dilakukan pemerintahan militer ini adalah melakukan pemulihan terhadap pemerintahan yang ditinggalkan oleh

²² Penyerahan yang dilakukan tanpa syarat apapun itu, secara tidak langsung menunjukkan hegemoni kekuatan Jepang atas Belanda. Dan hal itu semakin menguatkan uraian A.H. Nasution sebelumnya.

²³ M.A. Azis, *Japan's Colonialism* ..., h. 160.

orang-orang Belanda. Hal itu mesti dilakukan agar keamanan dan ketertiban masyarakat kembali terjaga. Di Jawa, terdapat 3 (tiga) wilayah *Gunseibu* yang berpusat di tiga kota besar Jawa, yaitu Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ketiga *Gunseibu* yang mewakili wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tersebut dipimpin oleh *Gunseikan* yang duduk di *Gunseikanbu* masing-masing.

Pembentukan pemerintahan militer di Jawa dirintis oleh Letnan Jederal H. Imamura yang saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara ke-16 Jepang. Tugas itu dilakukannya pada awal masa pendudukan Jepang dengan dibantu oleh Mayor Jenderal S. Okasaki yang tengah menjabat sebagai kepala staf pasukan tentara ke-16.

Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang paling awal adalah optimalisasi peran-peran orang Jepang dan pribumi dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, pemecatan pun dilakukan terhadap pegawai-pegawai yang berkebangsaan Belanda ataupun orang-orang berkulit putih lainnya. Jabatan-jabatan kosong yang ditinggalkan orang-orang Eropa itu selanjutnya diisi oleh pegawai-pegawai berkebangsaan Jepang dan juga pribumi. Porsi pegawai untuk

orang-orang bumiputera pun semakin bertambah seiring berkurangnya calon pegawai-pegawai yang hendak didatangkan oleh Jepang akibat perang. Dalam hal ini, sejumlah kapal yang memuat calon pegawai birokrasi dari Jepang banyak yang ditembaki oleh torpedo-torpedo tentara Sekutu sehingga banyak yang tenggelam dan tidak bisa melanjutkan perjalanan hingga ke wilayah pendudukan.²⁴

Peristiwa-peristiwa itu menguntungkan bangsa Indonesia karena selanjutnya banyak di antara mereka yang direkrut sebagai pegawai negara. Dengan perekrutan ini, Pemerintah Militer Jepang tidak hanya berhasil mendapatkan tenaga-tenaga kepegawaian baru yang bisa dioptimalisasikan namun juga mendapatkan keuntungan karena bisa meraih simpati rakyat Indonesia yang merasa dilibatkan dalam penyelenggaraan negara.

Pengangkatan orang-orang bumiputera sebagai pangreh praja, tidak hanya terjadi di tingkatan jabatan rendah, namun juga hingga ke tingkatan yang tinggi. Sebagai contoh, Raden Pandu Suradiningrat diangkat oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang sebagai Wakil Gubernur dan Atik Suardi sebagai Pembantu Wakil Gubernur di

²⁴ M.A. Azis, *Japan's Colonialism* ..., h. 158.

wilayah Jawa Barat. Mereka berdua menemani Gubernur yang diangkat dari pria berkebangsaan Jepang yang bernama Kolonel Matsui.

Tidak lama setelah itu, dibentuk pula susunan administratif pemerintahan pendudukan dalam tingkatan yang lebih spesifik di Jawa yakni pemerintahan pada tingkat karesidenan. Dan beberapa residen pun dikukuhkan pada tanggal 29 April 1942, yaitu:

- 1) Residen Banten yang dijabat oleh R. Adipati Aria Hilman Djadiningrat dan berkedudukan di Serang;
- 2) Residen Bogor, R.A.A. Surjadjajanegara, yang kedudukannya ada di kota Bogor;
- 3) Residen Priangan, yang dipimpin oleh R.A.A. Wiranatakusumah dan berkedudukan di Bandung;
- 4) Residen Cirebon yang dijabat Pangeran Ario Suriadi dan kedudukannya di Cirebon;
- 5) Residen Pekalongan, yang bernama R.A.A. Surjo, dan berkedudukan di wilayah Pekalongan; dan
- 6) Residen Banyumas, R.A.A. Sudjiman Martadiredja

Gandasubrata, yang kedudukannya di Banyumas.²⁵

Pada Agustus 1942, penguasa Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 27 tentang aturan-aturan dalam pemerintahan daerah. Selain itu, dikeluarkan pula *Osamu Seirei* No. 28 tentang aturan-aturan dalam pemerintahan *Syu* dan *Tokubetsu Syi* di karesidenan dan di daerah istimewa atau daerah-daerah tertentu saja.²⁶ Kedua peraturan yang dikeluarkan Jepang tersebut merupakan kelanjutan dari penyusunan struktur pemerintahan yang sebelumnya hanya bersifat temporal karena dibuat secara mendesak dan hanya diisi oleh kalangan militer semata. Pelaksanaan sistem ini dapat dilaksanakan karena tenaga-tenaga terampil Jepang di dalam bidang administrasi sipil mulai berdatangan ke Pulau Jawa setelah menjalani perjalanan yang cukup lama di lautan.

Menurut uraian yang terdapat dalam *Osamu Seirei* No. 27, Pulau Jawa dibagi menjadi beberapa wilayah pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa dan general. Untuk daerah istimewa, terdapat dua daerah yang diperintah oleh keturunan Raja Jawa (*koci*) di Yogyakarta dan Surakarta, serta satu

²⁵ *Asia Raya*, 4 Mei 1942.

²⁶ *Pandji Poestaka*, No. 8, 8 Agustus 1942.

daerah pusat pemerintahan militer Jepang di Jakarta. Sementara itu, daerah-daerah lainnya terbagi ke dalam satuan-satuan administratif yang dikenal sebagai karesidenan. Meski demikian, pada saat itu, penyebutan karesidenan telah dirubah dengan kosakata yang berasal dari Jepang, yaitu *Syu*. Terdapat tujuh belas *Syu* di Pulau Jawa yang dibentuk sesuai dengan aturan tersebut, yang jika diurutkan dari barat ke timur adalah: Banten, Batavia (Jakarta), Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura.

Di bawah *Syu*, terdapat satuan administratif lain yang juga penyebutannya dirubah, yaitu *Syi* (kotapradja) dan *Ken* (kabupaten). *Ken* membawahi sejumlah *Gun* atau kawedanan, dan *Gun* meliputi beberapa *Son* atau kecamatan, dan *Son* terdiri dari beberapa *Ku* atau desa, dan *Ku* merupakan kumpulan dari *Aza* atau kampung, sedangkan *Aza* membawahi sejumlah *Kumi* atau rukun tetangga yang merupakan satuan administratif paling kecil.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan Jepang dalam masa perang itu berpedoman pada hasil konferensi lembaga penelitian perang Jepang yang berlangsung

pada 1941. Isi pedoman itu, antara lain: 1) Pemerintah militer harus dibentuk secepat mungkin di daerah yang diduduki agar dengan segera keamanan dan ketertiban dapat segera dipulihkan dan yang terpenting, dapat melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber yang berguna bagi kelancaran perang; 2) Pemerintah militer yang dibentuk itu agar jangan mencampuri atau berlaku semena-mena terhadap kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat; 3) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan lalu lintas perdagangan serta fasilitas keuangan; dan 4) Pemerintahan militer yang ada, berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan bentuk lain yang penetapannya baru dilakukan pada waktu-waktu kemudian.²⁷

Dasar tindakan yang telah digariskan sebelum kedatangannya ke Nusantara itu, membuat pimpinan militer Jepang memberi himbauan yang jelas terkait kehadiran mereka di Hindia Timur dan hubungannya dengan masyarakat bumiputera. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya pun ditekankan agar

²⁷ Elsbrec, Wlliard H. *Japan's Role in Southeast Asean Natioanlist Movement's 1940-1945*, Massachusset, 1953), h. 15-18.

bisa sampai hingga ke pelosok-pelosok desa di Jawa.²⁸

Pemerintah militer Jepang mengeluarkan banyak kebijakan yang bersifat massal. Meskipun tujuan utama kebijakan-kebijakan itu adalah sokongan kuat untuk gerak militer mereka dalam Perang Asia Timur Raya, namun ternyata menjadi penyalur-penyyalur penting rasa simpati rakyat terhadap orang-orang Jepang. Kebijakan yang dimaksud adalah pembentukan organisasi pergerakan dan politik seperti Gerakan 3A pada 29 April 1942, Badan Pemuda Asia Raya pada 11 Juni 1942, dan Poesat Tenaga Rakjat (Poetera) pada 16 April 1943.²⁹

²⁸ Anjuran itu tertuang dalam pelbagai media massa, yang salah satunya terdapat dalam media *Panji Pustaka*. Isinya adalah agar pemerintah militer: 1) Hendaknya mengindahkan dan melanjutkan kebaikan tata pemerintahan mengenai adat-istiadat rakyat bumiputra, dan 2) Hendaknya menyatukan susunana tata pemerintahan daerah supaya rancangan-rancangan yang diadakan oleh pucuk pimpinan bala tenatra (Jepang) dapat dijalankan dengan rapi dan langsung sampai ke sudut-sudut tanah Jawa serta Madura. *Pandji Poestaka*, No. 2, 11 April 1942.

²⁹ Poetera merupakan organisasi pengganti Gerakan 3A pada masa pendudukan Jepang. Gerakan 3A dianggap oleh penguasa Jepang tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap citra Jepang di tengah masyarakat sehingga kemudian terjadi pembubaran terhadap gerakan tersebut pada 9 Maret 1943. Sebagai gantinya, dibentuklah Poetera (Poesat Tenaga Rakjat) dengan kepemimpinan di bawah Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Kyai Haji Mas

Kemudian, ada pula perkumpulan *Jawa Hokokai* (Kebaktian Jawa) yang berada langsung di bawah pengawasan *Gunseikan*. Meskipun perkumpulan ini merupakan organisasi resmi pemerintahan Jepang dan memiliki serangkaian tugas yang ditujukan untuk kepentingan Jepang, nyatanya tetap memerhatikan kepentingan masyarakat pribumi. Sebagai contoh, ketika kondisi rakyat tengah jenuh dengan sikap dan perilaku semena-mena tentara Jepang dalam pelbagai pelaksanaan kebijakannya, terjadi huru-hara atau perlawanan petani di Indramayu dan kaum agamawan di Singaparna. Untuk menenangkan situasi panas itu, *Jawa Hokokai* memberikan masukan kepada pemerintahan militer Jepang terkait interaksi mereka dengan rakyat bumiputera.³⁰

Kemudian ada pula organisasi yang bersifat militer dan semi militer, seperti tentara PETA (Pembela Tanah Air), *Heiho* (tentara

Mansur. Seluruh pimpinan Poetera itu dikenal sebagai Empat Serangkai dan dianggap sebagai representasi aliran-aliran kelompok pergerakan nasional Indonesia. Lihat, George Mc. Turner Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York, Cornell University Press, 1952, h. 106.

³⁰ *Jawa Hokokai* memberikan saran yang sangat berarti bagi pemerintahan pendudukan Jepang terkait tata cara pengumpulan padi dan pembudidayaannya. Untuk lebih lengkapnya, saran ini bisa dilihat dalam lampiran.

pembantu), *Keibodan* (barisan pembantu polisi), *Seinendan* (barisan pemuda), dan *Fujinkai* (barisan wanita). Pengerahan orang-orang pribumi dalam bidang kemiliteran ini, dimulai sejak 1943 ketika para pemimpin militer Jepang menyadari akan kerentanan sikap ofensif mereka dalam perang. Oleh karena kebutuhan itu, maka tenaga manusia dari Indonesia dan Malaysia pun mulai diperhitungkan. Terkait hal ini, salah seorang perwira di Biro Urusan Militer dan Kementerian Angkatan Darat yang bernama Kolonel Nishiura-Susumu, mendapat tugas untuk menyusun draft naskah yang kemudian ia isikan dengan serangkaian ide mengenai pengerahan pasukan yang terdiri dari orang-orang pribumi untuk menggantikan serdadu-serdadu Jepang yang dikirim ke medan pertempuran di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Setelah naskah itu dilaporkan dan diterima atasannya, pimpinan militer Jepang segera mengambil keputusan untuk merealisasikan ide sang perwira.³¹ Walaupun mobilisasi massa untuk kegiatan perang ini sangat merugikan karena banyak di antaranya dilakukan dengan tindak kekerasan, namun manfaatnya pun

³¹ Nugroho Notosusanto, *Tentara PETA pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 54-55.

cukup terasa di kalangan rakyat pribumi karena di zaman Jepang inilah rakyat mulai mengenal mental kebangsaan yang kuat dan strategi perang yang maju.

Memasuki tahun 1943, sikap tentara Jepang yang semula ofensif menjadi defensif akibat perlawanan tentara Sekutu yang semakin mengalami kemajuan. Dalam kurun waktu 1943-1944, sejumlah wilayah kepulauan di Pasifik yang sebelumnya dikuasai Jepang berhasil direbut oleh Sekutu. Dengan kondisi yang semakin terdesak itu, Jepang mulai merasa khawatir dan was-was karena akan menerima kekalahan. Walaupun begitu, pemerintah militer Jepang tetap menyadari bahwa kekhawatiran itu jangan sampai diketahui ataupun terlihat di depan publik. Oleh sebab itu, mereka melakukan pelbagai macam upaya untuk menutupinya seperti larangan mendengarkan siaran radio-radio asing, pemancar, dan lain-lain.³²

Guna tetap mendapatkan simpati penduduk di tengah keterdesakannya, Jepang memberikan banyak janji kepada masyarakat Hindia. Salah satu janji yang kemudian menjadi sangat

³² Larangan mendengarkan siaran radio asing itu diikuti pula dengan penyegelan alat pesawat dan pemancar radio yang dimiliki oleh sejumlah pihak pada 15 Juni 1945. Baca, Notosusanto, *SNI*, Jilid VI, 1975, 178

penting bagi perkembangan bangsa ini adalah janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh pemimpin militer Jepang terhadap bangsa Indonesia. Janji untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan itu seolah semakin terlihat jelas, mengingat sidang-sidang *Chuo Sangi In* (Dewan Pertimbangan Pusat) selalu mendorong percepatan pelaksanaan janji tersebut. Kabar baik juga datang dari *Saiko Shikikan* (Panglima Tentara) yang menyebutkan bahwa tujuan utama dari perang dan kemerdekaan Indonesia adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dalam kehidupan rakyat.³³

Pada paruh awal 1945, angkatan perang Sekutu mulai mendekat ke pusat kekuasaan Jepang di Hindia. Dari arah timur, armada perang gabungan orang-orang Barat itu telah melancarkan serangan ke Ambon, Manado, Makassar, Balikpapan, dan Surabaya. Dengan kondisi yang demikian itu, pemimpin militer Jepang di Jakarta kembali menelurkan kebijakan terkait pemenuhan janji kemerdekaan yang mereka pernah tawarkan.

Pertemuan antara Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat dengan Marsekal Darat Terauci di Dalat (Vietnam)

merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak berdirinya bangsa Indonesia. Di dalam pertemuan itu, sang panglima kembali mengingatkan perihal janji-janji ekspansi Jepang, termasuk salah satu di antaranya adalah mengenai rencana kemerdekaan yang diatur dalam badan yang mengurusinya. Menurut Terauci, kemerdekaan Indonesia akan segera diberikan dan disahkan pada 24 Agustus 1945, setelah para anggota PPKI (Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia) melaksanakan rapat penentuan segala persiapan pada 19 Agustus 1945.³⁴

D. Propaganda terhadap Umat Islam Pada Zaman Jepang

Islam Indonesia begitu menarik di mata orang-orang Jepang sehingga mereka segera melakukan pendekatan kepada kaum Muslim Indonesia pada era kekuasaannya. Bahkan jauh sebelum kedatangannya ke Jawa, Jepang telah melakukan berbagai studi mengenai karakteristik ajaran Islam yang ada di Jawa melalui sejumlah lembaga studi Islam di Jepang yang telah bermunculan sejak paruh kedua tahun 1920-an. Dalam simpulan studi-studi yang mereka laksanakan,

³³ *Asia Raya*, 22 Februari 1945

³⁴ Benedict R.C.G. Anderson, *Java in a Time of Revolution 1945-1946*, (London: 1972), h. 63.

orang Jepang melihat bahwa umat Islam memiliki sikap yang sangat berlawanan dengan kolonialisme atau dengan kata lain Islam Indonesia sangat anti-imperialisme Barat, dan karenanya kelompok ini memiliki potensi yang baik untuk mendatangkan kekuatan massa yang besar.³⁵

Pada masa selanjutnya, yaitu pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda senantiasa bersikap represif terhadap pergerakan yang dilakukan oleh orang Hindia. Hal itu melahirkan sikap antipati yang kuat terhadap segala hal yang berbau kolonial. Karenanya, timbulah semangat nasionalisme yang semakin menguat dan mereka mulai mencari model yang tepat untuk energi mereka itu ke negeri-negeri di sekitarnya. Jepang menjadi salah satu negara yang kemudian menjadi contoh model ideologi nasionalisme melalui orang-orang Indonesia yang melakukan kontak dengan Jepang seperti Madjid Usman, Mahjuddin Gaus, Purwadarminta, Joesoef Hassan, Soetomo, Raden Sudjono, dan Soekardjo Wirjopranoto.³⁶

³⁵ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 254.

³⁶ Ken'ichi Goto, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Penerjemah: Hiroko Otsuka, Nandang Rahmat, dan Edy Mulyadi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 405.

Kesan baik dari Jepang semakin mengemuka ketika Jepang memberikan izin penyelenggaraan Kongres dan Pameran Islam berskala internasional yang dilaksanakan di negerinya. Pimpinan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang diwakili oleh Abdul Kahar Muzakir, Achmad Kasmat, Faried Ma'roef Machfud Siddiq, dan Abdulah Al Moedi, hadir dalam acara tersebut. Dalam acara tersebut, terdapat kesan positif yang sulit dilupakan oleh para delegasi dari MIAI yaitu pengibaran bendera Merah Putih yang sejajar dengan bendera negara-negara lainnya.³⁷ Untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin, Jepang mengutus para ahlinya ke beberapa negara, termasuk ke tanah Jawa yang diwakili oleh T. Kanaya. Dengan adanya perutusan ini, hubungan Jepang dengan kaum muslim di Hindia pun semakin mesra.

Pada tahun 1942, Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Sejak masa awal kekuasaannya itu, orang Jepang langsung memulai propagandanya terhadap kalangan umat Islam di Jawa. Sejumlah propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Jepang saat itu, di antaranya adalah:

³⁷ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang*, h. 134.

1. Aktif dalam kegiatan keagamaan

Tidak lama setelah Jepang berhasil menguasai tanah Hindia, mereka langsung melakukan pendekatan yang khusus terhadap kelompok Islam. Di beberapa masjid di Batavia, saat acara keagamaan berlangsung, orang muslim yang seharusnya khusyu beribadah itu dikagetkan dengan kehadiran sejumlah muslim Jepang yang berseragam tentara mengikuti kegiatan masjid mereka. Tidak lama setelah itu, Kolonel Horie beserta Muhammad Abdul Muniam Inada, orang muslim Jepang, melakukan orasi dan berpidato di Masjid Kwitang mengenai kehadiran pendudukan Jepang dan hubungan dekat mereka dengan kalangan Islam.³⁸

Pembicaraan itu merupakan upaya yang dilakukan oleh Jepang untuk meyakinkan kelompok Islam bahwa mereka adalah sahabat yang tidak berseberangan, malah memiliki kepentingan bersama, dan tidak memiliki

potensi membahayakan eksistensi Islam sama sekali.

Kecuali setelah adanya tindak pemaksaan dan represif, upaya pendekatan Jepang itu membuahkan hasil karena dalam beberapa waktu selanjutnya, kaum muslim sama sekali tidak menganggap orang-orang Jepang sebagai lawan “kafir” sama sekali seperti halnya anggapan mereka terhadap orang-orang Belanda. Bahkan orang Jepang dianggap sebagai saudara, terlebih ada desas-desus bahwa Sang Kaisar Jepang pun akan menjadi muallaf dan membentuk kekhalifahan raya di dunia.³⁹

Di samping akibat aksi dan aktivitas tentara Jepang dalam kegiatan orang-orang Islam, tampaknya pendekatan Jepang yang sebelumnya dilakukan telah menumbuhkan kepercayaan dan simpati terlebih dahulu di dalam benak orang bumiputera.

2. Pendekatan terhadap Pemuka Agama Islam

Propaganda yang selanjutnya dilakukan oleh

³⁸ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 142.

³⁹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 135.

Pemerintah Bala Tentara Nippon adalah pendekatan terhadap orang-orang terpendang di dalam agama Islam yang disebut dengan nama *ulama*. Dalam kebijakan politik khusus Jepang terhadap Islam Jawa yang disebut oleh Benda sebagai *Nippon's Islamic Grass Roots Policy*, diketahui bahwa sasaran penting dari propaganda mereka tersebut adalah para tokoh Islam atau kelompok agamawan terpendang yang ada di tengah masyarakat, yang antara lain: *kyai*, *ajengan*, *ulama*, pemimpin pondok pesantren, dan tokoh-tokoh agama Islam lainnya.

Dengan pendekatan yang ditujukan pada pemimpin teras kaum muslim tersebut, pemerintah militer Jepang berharap agar mereka mau membantu pengkondisian spirit perjuangan di tengah masyarakat yang mayoritasnya adalah Islam.

Saat itu para pemimpin Jepang menganggap bahwa dengan menguasai tokoh agama Islam, maka mereka secara tidak langsung akan menguasai pelbagai kalangan muslim yang tersebar di desa-

desa, pesantren-pesantren, dan kantong-kantong pemeluk agama Islam lainnya. Tidak jarang upaya tersebut dibarengi dengan hal-hal yang seolah tidak masuk akal.⁴⁰ Dengan cara yang demikian, Jepang berusaha untuk mengambil keuntungan dari sikap loyal para santri dan masyarakat terhadap para ulama dan para pemimpin agama. Militansi yang tinggi dan semangat juang yang pantang menyerah menunjukkan bahwa peran para ulama sangat vital dan menguntungkan bagi Jepang. Untuk mempermudah kinerjanya, pemerintah militer Jepang mendikotomikan antara ulama dan para tokoh politik/organisasi.⁴¹

Kesempatan besar yang diberikan terhadap tokoh-tokoh Islam untuk berkiperah di dalam kegiatan politik dan keagamaan di tingkat nasional

⁴⁰ Hal itu terlihat dari upaya Jepang yang berani memberi penekanan persamaan antara Shinto dan Islam, sehingga Kaisar Jepang pun akan melakukan konversi kepercayaan menjadi seorang muslim demi kegemilangan suatu kekuasaan Islam yang memiliki pusat di Kekaisaran Khalifah Jepang Raya. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, 135.

⁴¹ Dwi Purwoko, *Pemuda Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1993), h. 71.

semakin memperkuat kecurigaan akan propaganda Jepang dalam bidang ini. Sebagai contoh, melalui penunjukan Ki Bagus H. Hadikusumo, K.H.M. Mansur, Sukiman, Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Agus Salim agar menjadi bagian dalam BPUPKI dan PPKI, kita melihat adanya usaha keras Jepang untuk mewujudkannya karena hal ini belum pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Secara praktis, apa yang diberikan oleh Jepang tersebut membuat pamor para pemimpin teras Islam semakin naik dan meningkat sehingga mereka pun menjadi lebih masyhur dari sebelumnya.

3. Keberpihakan dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Di samping mendekati umat Islam Jawa melalui para tokohnya, Pemerintahan Bala Tentara Nippon juga melakukan pendekatan dengan cara menggulirkan kebijakan yang populis terhadap pendidikan Islam. berbeda dengan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang begitu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan pendidikan

Islam di Jawa, Pemerintahan Militer Jepang memberikan banyak ruang toleransi terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam di era kekuasaannya.

Pelaksanaan pendidikan tidak bersifat berat sebelah, melainkan seimbang dan setara antara orang Jepang dan bumiputera. Tidak jarang di kelas-kelas sekolah saat itu terdapat siswa berkebangsaan Jepang dan pribumi yang belajar bersama meskipun dalam beberapa hal masih terdapat kekhususan tertentu yang diberikan kepada orang-orang Jepang.

Penerapan kebijakan yang demokratis dan egaliter dalam dunia pendidikan Islam tersebut, telah membuat orang-orang Islam mengerti arti kesetaraan dan kesamaan derajat manusia. Terlebih di masa ini, tidak ada lagi kebijakan yang mengekang seperti halnya aturan *ordonansi* di zaman Belanda, sehingga para ulama yang hendak mengajarkan agama bisa lebih bebas untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam tanpa takut ancaman

untuk dijebloskan ke dalam bilik dingin penjara.

Tentara-tentara Nippon pun tidak jarang memberikan pengajaran ilmu-ilmu bela diri yang baik kepada para pemuda muslim secara langsung. Hal ini terdapat dalam pembelajaran yang selanjutnya dikhususkan dalam program-program tertentu yang digarap pemerintah untuk mendukung laju gerak perang yang diikutinya.

Pada masa pendudukan tersebut, banyak pula pembangunan tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang dilakukan sehingga kegiatan keagamaan dan pendidikan yang berlabel Islam bisa berjalan dengan nyaman.

4. Pembentukan Lembaga-Lembaga untuk Kaum Islam

Untuk mendukung kegiatan pemerintahannya dalam sektor keagamaan, pemerintahan Jepang membentuk lembaga tertentu yang membawahi bidang tersebut. Lembaga pemerintah yang dimaksud adalah *Shumubu* dan *Shumuka* yang di era sekarang seperti Kantor Urusan Agama (KUA), baik

itu di tingkat pusat ataupun daerah.

Tujuan pembentukan *Shumubu* dan *Shumuka* adalah untuk pengurusan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Melalui kedua lembaga tersebut, Jepang bermaksud untuk menunjukkan pada umat muslim di Hindia bahwa Jepang memiliki kepedulian dan menaruh perhatian yang besar terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam. Kehadiran lembaga tersebut selanjutnya berhasil memunculkan kepercayaan masyarakat muslim terhadap Pemerintahan Militer Jepang.

Dalam bingkai yang lebih besar, Pemerintah Militer Nippon juga membentuk *Majelis Syuro Islam Indonesia* (Masyumi) untuk mengakomodir kelompok Islam. Lembaga ini didirikan sebagai pengganti *Majelis Islam A'la Indonesia* (MIAI) yang sebelumnya dibubarkan karena adanya perintah dalam *Osamu Seirei* (Maklumat) yang dikeluarkan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman.

Meskipun secara politis pembentukan Masyumi itu seolah menjadi cara bagi

Jepang untuk menghentikan gerak MIAI yang mulai tidak bisa dikontrol, namun dalam kenyataannya Masyumi semakin menjelma seperti halnya MIAI. Hal itu dapat dilihat dari segi kegiatan dan kepengurusan yang menunjukkan persamaan kental di antara keduanya. Gagasan, pemikiran, dan aspirasi politik kaum muslim pun masih bisa disalurkan melalui wadah keagamaan ini.

Kebermanfaatan yang paling terasa dari organisasi tersebut bagi para pemuka agama Islam adalah adanya suatu media yang memungkinkan terjalinnya komunikasi antar-ulama di tingkat nasional, dan itu dapat berlangsung melalui lembaga MIAI, sehingga para tokoh agama yang berasal dari pelbagai daerah dan kalangan dapat saling menyapa, bersilaturahmi, dan bertukar-pikiran mengenai pelbagai isu keagamaan yang tengah berkembang pada masa itu.

Di bidang militer, Pemerintahan Bala Tentara Nippon juga membangun suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang Islam yang

diberikan pelatihan secara ketat dan terstruktur. Kesatuan yang dimaksud adalah Tentara *Hizbullah* (Tentara Allah) yang masih memiliki afiliasi dengan Masyumi.

Memang Jepang juga membentuk kesatuan militer lain seperti *Seinendan*, *Keibodan*, *Suishintai*, dan *Gakutotai*, yang bersifat semi-militer ataupun *PETA* dan *Heiho* yang bersifat militer, namun pembentukan *Hizbullah* tetap dirasa istimewa karena hanya satuan ini yang dibentuk berdasarkan satu orientasi kepercayaan tertentu.

Bagaimanapun polemik yang ditimbulkan oleh pembahasan mengenai satuan-satuan ini, yang jelas pembentukan organisasi militer dan semi-militer yang terjadi di zaman Jepang berhasil membuat semangat dan mental orang Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Jika sebelumnya rasa pesimis selalu menghinggapi, pasca pelatihan itu mereka merasa lebih optimis. Dan jika sebelumnya ketakutan selalu berada di dalam diri, maka setelah mengikuti program itu mereka dapat menjadi lebih berani.

Dengan kata lain, pembentukan Hizbullah telah berhasil memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai cara berorganisasi, penyusunan strategi, dan penggunaan senjata modern yang mendalam terhadap kelompok Islam sehingga kaum muslim menjadi semakin mengerti dunia militer dengan lebih baik. Pelatihan intensif yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang, membuat pemuda-pemuda Islam semakin bersemangat dan bermental kuat

E. Penutup

Kata "propaganda" merupakan kata sifat yang berasal dari bahasa Latin dengan kata kerja *propago* (dari *pro* yang artinya maju dan *pag* dari akar kata *pangere* yang artinya untuk mengikat). Apabila digabungkan, "*propagare*", yang berarti maju untuk mengikat, memiliki makna menyebarkan informasi tertentu dengan tujuan untuk mengikat mereka yang mendapatkan informasi tersebut. Propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku dari penerima (komunikan) sesuai dengan

pola yang telah ditetapkan oleh komunikator.

Pada masa terakhir kekuasaannya, tentara Hindia Belanda tidak berdaya menghadapi serbuan Jepang ke Indonesia. Kekuatan tentara Hindia Belanda di Jawa ketika itu seluruhnya hanya berjumlah empat divisi, hancur lebur oleh kekuatan tentara Jepang mengearhkan yang mencapai delapan divisi. Pada akhirnya, Jepang berhasil menaklukkan Belanda tanpa syarat di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu, Hindia Belanda resmi diduduki oleh pemerintahan militer Jepang.

Dalam upayanya mempertahankan kekuasaan dan kekuatan dari serangan Sekutu, Jepang mendekati unsur-unsur masyarakat Indonesia. Salah satu yang menjadi sasaran itu adalah umat Islam, yang dianggap Jepang sebagai kelompok mayoritas yang bisa diajak kerjasama. Dengan dasar itu, kemudian Jepang melakukan propaganda secara khusus terhadap umat Islam dengan terus memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Islam Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel dan Buku

- Affandi, Muhajir. 2017. *Komunikasi Propaganda Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anderson, Benedict R.C.G. 1972. *Java in a Time of Revolution 1945-1946*. London.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabut dan Matarahari Terbit: Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Penerjemah: Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Elsbrec, Williard H. 1953. *Japan's Role in Southeast Asean Natioanlist Movement's 1940-1945*, Massachusset.
- Goto, Ken'ichi. 1998. *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Penerjemah: Hiroko Otsuka, nandang Rahmat, dan Edy Mulyadi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kahin, George Mc. Turner. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York, Cornell University Press.
- Koen, Auwjong Peng. 1957. *Perang Pasifik 1941-1945*. Jakarta: Pintu besar.
- Kurasawa, Aiko, 1987. "Propaganda Media On Java Under the Japanese 1942-1945." dalam *Indonesia* No. 44, October 1997.
- Kurasawa, Aiko, 1993. *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Gramedia, Jakarta.
- Laswell, Harold D. 1971. *Propaganda Technique in World War I*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Legge, John David. 1977. *Indonesia*. Sydney: Prentice-Hall of Australia.
- Liliweri, Alo. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia abad Ke-20: Dari Kebangkitan nasional Sampai Linggarjati*, Volume 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, Jilid II. Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, Abdul Haris. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 1. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Notosusanto, Nugroho, ed.. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Jakarta: Balai Pustaka.
- Notosusanto, Nugroho, ed.. 1979. *Tentara PETA pada Jaman Pendudukan Jepang di*

- Indonesia*, Jilid VI, Jakarta: Gramedia, 1979.
- Purwoko, Dwi. 1993. *Pemuda Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Bonafida Cipta Pratama.
- Qadaruddin, Muhammad. 2016. *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Robertson, Eric. 1979. "The Japanese File: Pre-war Japanese Penetration in Southeast Asia", Volume 18, Singapore, Heinemann Asia.
- Sastropoetro, R.A Santoso. 1991. *Propaganda: Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa* (cet. ketiga). Bandung: Alumni.
- Santosa, Iwan. 2004. *Tarakan: "Pearl Harbor" Indonesia, 1942-1945*. Jakarta: Primamedia Pustaka.
- Setyohadi, Tuk. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Bogor: Rajawali Corporation.
- Soebagijo IN. 1980. *Sumanang Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Suwondo, Prabu S., dkk. 1996. *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- The Electronic Dictionary Research and Development Group, *Zkanji*, (Monash: Monash University, 2012).
- Quispel, H. V. 1945. *Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog*. London: The Netherlands Publishing.
- Walton, Douglas. 1997. "What is Propaganda, and What Exactly is Wrong with it?", *Public Affairs Quarterly*, 11.

Surat Kabar

Asia Raya, 4 Mei 1942.

Asia Raya, 8 Juni 1942.

Asia Raya, 22 Februari 1945

Kan Po, tahun 1944, No. 55.

Pandji Poestaka, No. 2, 11 April 1942.

Pandji Poestaka, No. 8, 8 Agustus 1942.

Soeara Moeslimin Indonesia, No. 18, 15 September 1944.

Lampiran 1

Saran dari hasil sidang *Cuo Sangi In* (Dewan Penasehat Pusat) ke-6 Jawa Hokokai:

- A.
 1. Mempergiat keinsyafan dengan jalan yang amat mudah kepada rakyat tentang pentingnya memperlipat gandakan hasil bumi dan penyerahan padi, dan
 2. Menyediakan barang-barang keperluan petani sebagai hadiah atau dengan harga murah, sebagai epnghargaan atas kebaktian mereka yang telah menyerahkan padi sebanyak-banyaknya pada pemerintah; Jawa Hokokat hendaknya disertai tugas menjalankan pekerjaan untuk usaha-usaha tersebut.
- B.
 1. Di setiap Ken hendaknya dibentuk koperasi pertanian atau Mogyo Kumisi di bawah pimpinan dan pengawasan yang berwajib;
 2. bersama-sama dengan *pangreh praja* dan pengurus koperasi pertanian, turut membantu supaya ketetapan bagian penyerahan padi oleh petani untuk tiap Ku, Son, Gun, dan Ken, dilakukan atas dasar dan ukuran yang seadil-adilnya;
 3. Hendaknya pengurus koperasi pertanian dapat mengeratkan hubungan dengan pabrik penggilingan padi;
 4. Hendaknya lumbung-lumbung padi dari koperasi pertanian diatur dengna lengkap dan disimpan di sana semua padi kepunyaan petani;
 5. Hendaknya diusahakan supaya semua padi diurus dan diatur oleh koperasi pertanian; dan
 6. Berhubung dengan adanya pengendalian harga padi yang tetap, maka hendaknya diusahakan pula agar harga barang-barang dikendalikan sehingga petani dapat membeli barang keperluan dengan mudah dan murah.

Sumber:
Kan Poo, tahun 1944, No. 55

Lampiran 2

Propaganda terhadap Umat Islam yang Dimuat dalam Media Massa

“ Kita haroes tahoe bahwa kalau lapangan baroe soedah terboeka, maka perloe kita sadar akan kedoedoekan kita, insaf akan kewadajiban jang kita pikoel dan jakin akan langkah jang kita tindakkan. Djoega dalam pembentoean Djaman Baroe ini, tidak koerang-koerang lapangan jang haroes dilaloei oleh alim oelama kita. istimewa sekali daja-oepaja membesar-besarkan dan menghebat-hebatkan modalnja kaoem Moeslimin oentoek melanjoeatkan perjoeangan kita. Jang kita maksoedkan ialah Angkatan Moeda Oemat Islam, menjediakan dasar jang kokoh oentoek anak-anak Islam kita di belakang hari. Berkenaan dengan hal ini, baiklahlebih doeloe kita perhatikan berita Domei baroe-baroe ini seperti berikoet:

“Toean2 Ogina dan Mr. Soemitro dari Departemen Pengadjaran bagian Agama Islam di Djakarta telah mengoendjoengi Djokjakarta oentoek memeriksa keadaan sekolah2 Islam, pesantren, dan tempat pemonokannja di Kotagede, Wonokromo dan lain2. Menoeroet keterangan toean2 Ogino dan Mr. Soemitro keadaan sekolah2 dan pesantren2 Islam itu sangat memoeaskan, melebihi dari jang disangkakan. Selandjoetnja oleh doea Pembesar Departemen Pengadjaran tsb. Diterangkan, bahwa pekerdjaan alim-oelama pada waktoe sekarang penting sekali”

Perhatikan kalimat jang terachir dalam berita singkat itoe. Pekerdjaan alim oelama pada waktoe sekarang ini penting sekali. Nistjaja sekali jang dimaksoedka dengan kepentingan itoe teroetama jang berhoeboengan dengan masalah PENDIDIKAN. Pendidikan anak-oemat, pendidikan tjalon-oemmat, pendidikan bakal pemangkoenja bangsa dan Noesa”

Sumber:

“Alim Oelama: Menghadapi Pendidikan Ra’jat”, Soeara Madjelis Islam A’la Indonesia (30 Radjab 1364/ 1 Agoestoes 2603).

“Atas oesahanja Gunseikanbu Sjumubu pada permoelaan boelan ke 7 tahoen 2603 diadalan Latihan-Oelama dari seloeroeh Djawa dan Madoera, jang lamanja satoe boelan dan diadakan dalam tiga rombongan jang mengambil tempo tiga boelan dan dapat melatih 3 x 60 = 180 alim oelama oentoek bekerdja bersama dengan Bala Tentara Dai Nippon dalam mentjicptakan kemakmoeran Asia Timoer Raja. Segala ongkos2 keperloean Latihan ini dipikoel oleh Pemerintah sendiri dan para Alim Oelama mendapat poela soebangan oentoek nafkah keloearganja selama mengoendjoengi latiahn itoe jang diadakan di Djakarta bertempat di Gedoeng MIAI. Oentoek penginapannja disediakan doea boeah roemah besar di Kramat No. 45 dan 47 dengan ditjoekoepkan sekalian berhoeboengan dengan tempat sembahjang, beladjar, tempat tidoer, makan minoem menjoeetji dll”

Sumber:

“Pendapatan Selama Latihan Oelama oleh H. A. Musaddad” *Soeara Madjelis Islam A’la Indonesia* (1 Ramadhan 1362/ 1 September 2603), h. 11